



Dampak Tata Kelola Lokal terhadap Pengembangan Desa Pintar di Indonesia

Dicky Auliya Rochman, Ilmi Usrotin Choiriyah*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam mewujudkan desa pintar, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Teori desa pintar oleh Herdiana (2019) digunakan sebagai kerangka, meliputi tiga indikator: smart government, smart community, dan smart environment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sebagai fasilitator telah menyediakan fasilitas aplikasi dan website yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Sebagai motivator, pemerintah desa menggerakkan semua elemen untuk berkompetisi dalam menggunakan teknologi guna menciptakan desa pintar. Sebagai dinamisor, pemerintah desa mendorong kerjasama komunitas untuk mensukseskan konsep desa pintar melalui sosialisasi dan pendampingan. Meskipun implementasi smart government dan smart community telah berjalan baik, indikator smart environment masih belum optimal. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mendorong pengembangan desa yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Smart Village, Inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.321>

*Correspondence: Ilmi Usrotin Choiriyah

Email: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Received: 01-06-2024

Accepted: 02-06-2024

Published: 11-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the role of the Sugihwaras Village Government in realizing a smart village, utilizing a qualitative descriptive method. Data were collected through observation and interviews, with purposive sampling techniques used to determine informants. The smart village theory by Herdiana (2019) was employed as the framework, encompassing three indicators: smart government, smart community, and smart environment. The findings indicate that the village government as a facilitator has provided application facilities and websites tailored to the needs of the community. As a motivator, the village government has encouraged all elements to compete in utilizing technology to create a smart village. As a dynamist, the government has promoted community cooperation to successfully implement the smart village concept through socialization and support. Although the implementation of smart government and smart community has been effective, the smart environment indicator has not been optimally implemented. This research highlights the importance of the active role of the village government in promoting sustainable and technology-based village development.

Keywords: Role of Village Government, Smart Village, Information And Communication Technology (ICT) Innovation

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat desa. Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonomi khusus dalam mengatur segala urusan pemerintahan dan segala kepentingan masyarakat desa dalam mewujudkan kemajuan desa (Hudayana et al., 2019). Desa adalah bagian terdepan dalam menentukan suatu arah kebijakan dalam rangka pembangunan nasional (Fitria & Raldianingrat, 2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 menyatakan bahwa hak untuk membangun sistem

informasi desa yang terdiri dari data desa, data pembangunan, wilayah, dan informasi lain yang terkait dengan pembangunan desa adalah milik Pemerintah Daerah dan Desa. Dalam rangka membangun kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat, pembangunan dibangun berdasarkan strategi “bottom-up” yang didorong oleh prakarsa dan keinginan Masyarakat (Herdiana, 2019). Pembangunan pada prinsipnya merupakan rangkaian proses dan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tersistem untuk mencapai kondisi yang diinginkan (Agunggunanto et al., 2016).

Menuju Indonesia emas tahun 2045 menjadi Negara maju, pemerintah di tingkat bawah yaitu Pemerintahan Desa perlu mempunyai grand desain dalam memanfaatkan teknologi guna mewujudkan *smart village*. Pemerintah Desa berperan penting dalam mewujudkan sebuah desa yang mandiri, dimana mereka bertanggung jawab atas kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan, bahkan pendidikan di desa kepada pemerintah daerah (Sadad et al., 2022). *Smart village* merupakan konsep Desa digital yang berorientasi pada pemanfaatan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi informasi di lingkungan Desa (Agunggunanto et al., 2016). Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kehidupan pedesaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi di masa depan, maka penerapan teknologi informasi dalam penerapan desa cerdas/*smart village* merupakan komponen krusial yang mendukung hubungan antara pemerintah desa, masyarakat desa dan lingkungan pedesaan (Agung & Rahman, 2021). Giffinger R, dkk (2007) menjelaskan bahwa karakteristik smart village dapat diukur melalui enam indikator yaitu, *smart government, smart people, smart economy, smart mobility, smart environment dan smart living* (Giffinger, 2007). Konsep *smart village* di Indonesia dikembangkan dengan cara yang berbeda. Dalam menciptakan konsep *smart village* di Indonesia, D.Herdiana (2019) mencatat bahwa tiga indikator *smart government, smart community, smart environment* dapat digunakan untuk menilai keberhasilan *smart village* (Komariah et al., 2018). dalam konsep *smart village, Smart Government* memiliki peranan dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan pelayanan dan kinerja produktivitas pemerintah desa. *Smart community* dalam konsep *Smart Village* ditujukan pada pemanfaatan teknologi informasi menjadi peluang bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa. teknologi informasi dihadirkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat guna ikut berkontribusi dalam pengembangan desa (Murdiyanto, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi dalam tataran sosial dapat digunakan untuk pengembangan dan penguatan nilai adat, budaya, dan struktur sosial. Tumbuhnya teknologi dalam informasi yang tepat dalam tatanan sosial akan menciptakan kelestarian struktur sosial. Konteks pemanfaatan teknologi dalam *smart environment* dapat digunakan dalam identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Komponen pemerintah desa, masyarakat desa, dan lingkungan pedesaan masing-masing memiliki peran dan tujuan yang berbeda. Konsep *smart village* harus dilaksanakan berdasarkan ketiga unsur tersebut karena peran dan pengaruhnya masing-masing (Ulum & Suryani, 2021).

Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan social kemasyarakatan yang sudah diatur dalam undang-undang (Habibi et

all., 2022). Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperjelas bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat adapada Kepala Desa dan Pemerintah Desa (Pradita & Damayanti, 2016). Pengertian pembangunan desa di atas mencakup peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekaligus Mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, membangun infrastruktur dan fasilitas, mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga kemiskinan dapat diberantas. Untuk mencapai keadilan sosial, pemerintah harus mengedepankan persatuan, kekeluargaan, dan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan desa. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas serta perilaku dan penggunaan sumber daya melalui kebijakan, program, acara, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan menghidupi diri sendiri. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga Desa diseluruh Indonesia masuk dalam kategori mandiri. Desa mandiri ialah desa yang memiliki akses terhadap pelayanan publik, infrastruktur yang memadai, fasilitas dasar, dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Desa mandiri mampu melaksanakan pembangunan desa dengan mengutamakan ketahanan sosial, ekonomi, dan perekonomian berkelanjutan guna menyejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidupnya, kondisi seperti ini mencerminkan keinginan masyarakat desa untuk maju dengan cara mengembangkan hasil karya/produk-produk masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya (Mulyan & Isnaini, 2022). Pemerintah Desa dalam membangun desa cerdas dapat diawali dengan memotivasi dan menggerakkan seluruh elemen yang berkepentingan guna memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam melaksanakan kegiatan administrasi desa dengan menggunakan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. dalam konsep *smart village* di Indonesia pendekatan yang diterapkan ialah *bottom-up* dan Untuk mencapai pemberdayaan kelembagaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Dengan uraian diatas maka pemerintah Desa dalam mewujudkan *smart village* memiliki peranan sebagai motivator, fasilitator, dinamisator (Masitah, 2019).

Perkembangan teknologi Informasi memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Mengingat betapa pesatnya perkembangan teknologi saat ini memudahkan seseorang dalam melakukan komunikasi jarak jauh, kemudahan mendapat informasi, hiburan, dan perkembangan teknologi juga dapat membantu peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Teknologi informasi digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan (*e-government*). *E-Government* secara umum mengacu pada program berbasis komputer dan internet yang dirancang untuk meningkatkan layanan masyarakat dan hubungan dengan pemerintah (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Implementasi *e-government* saat ini dilihat dengan adanya pelayanan terpadu dengan sistem online dan ditandai dengan adanya website resmi organisasi pemerintahan. Penerapan *e-government* akan mempermudah pemerintah dalam menyampaikan informasi antara pemerintah dan masyarakat (*government to citizen*) dan Pemerintah dengan swasta

(*government to business*). *E-government* merupakan sebuah inovasi dalam strategi komunikasi yang akan bermanfaat dalam menunjang peran pemerintah. Dalam pengembangannya *e-government* memiliki dampak yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, diantaranya: kemudahan akses dalam melakukan pelayanan menggunakan sitem digital tanpa harus pergi ke kantor pemerintahan dan kemudahan dalam mencari informasi yang sudah disediakan melalui sosial media pemerintah sehingga masyarakat dalam mencari informasi cukup lewat smartphone. Tabel 1 berikut merupakan rekap Skor Indeks Desa Membangun di Indonesia Pada tahun 2023 (Utomo & Satriawan, 2017).

Tabel 1. Rekap Status Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Desa Tahun 2023

Sumber: Diolah Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi (2023)

KLASIFIKASI STATUS	JUMLAH			DESA
	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	
MANDIRI	2	39	731	11,456
MAJU	16	182	2,533	23,035
BERKEMBANG	13	158	2,196	28,766
TERTINGGAL	2	36	635	7,154
SANGAT TERTINGGAL	3	19	459	4,850
TOTAL	36	434	6,554	76,261

Tabel diatas menggambarkan berdasarkan Penilaian Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2023, Desa mandiri mengalami peningkatan secara signifikan yaitu dari 6.238 Desa pada tahun 2022 menjadi sebanyak 11,456 Desa mandiri pada tahun 2023. IDM merupakan metode pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan menilai tingkat kemandirian dan kemajuan yang dicapai masyarakat. Ada tiga indeks komposit yang membentuk IDM, *pertama* ketahanan sosial yang terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan, pemukiman. *Kedua* ketahanan ekonomi dan *ketiga* ketahanan ekologi desa. Dalam rekap status kabupaten/kota tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo menempati posisi ke 60 dengan nilai rata-rata IDM kabupaten 0,7965 dengan status IDM Maju (Wahyuni, 2018).

Desa sugihwaras merupakan salah satu Desa yang pada tahun 2021 diakui sebagai penyelenggara inovasi pelayanan desa/kelurahan terbaik Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju *Smart City* di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pemerintah Daerah dan Desa agar Teknologi informasi dan Komunikasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, dan terarah. Desa Sugihwaras secara status IDM adalah Desa Mandiri. Tidak

hanya Desa Sugihwaras saja, setidaknya pada tahun 2022 ada 73 Desa di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki status Mandiri. Desa berstatus Mandiri tersebut tersebar di 14 Kecamatan. Pada Tabel 2 berikut merupakan skor indeksdesa membangun yang diperoleh Desa Sugihwaras pada tahun 2023(Saepudin, 2022).

Tabel 2. Skor Indeks Desa Membangun Desa Sugihwaras

Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sugihwaras (2023)

INDIKATOR IDM	SKO R
Indeks Ketahanan Sosial	0.98
Indeks Ketahanan Ekonomi	0.90
Indeks Ketahanan Lingkungan	0.93
TOTAL	0,938
	7

Tabel diatas merupakan skor Indeks Desa membangun yang diperoleh Desa Sugihwaras pada tahun 2023 ialah 0,9387 dengan status sebagai Desa Mandiri. Sejak 2019 Desa Sugihwaras telah memiliki beberapa program yang bertujuan untuk membangun generasi digital sejak usia dini, program-program tersebut diantaranya adalah griya sinaudigital, program dengan tujuan untuk memberikan pemerataan fasilitas kepada anak-anak yang kurang mampu untuk belajar mengenai dunia digital. Dengan adanya griya sinau digital ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam hal membuat Desain grafis, Microsoft office, video editing dan lain sebagainya. Dari segi pelayanan publik, Desa Sugihwaras sudah menerapkan pelayanan secara digital (*e-government*) dengan menggunakan aplikasi Sipraja (sistem pelayanan rakyat sidoarjo), selanjutnya *website* sugihwaras.desa.id merupakan sistem layanan informasi desa yang memuat beberapa informasi tentang profil desa, data kependudukan, informasi keuangan desa, pusat informasi bantuan sosial, pusat layanan aduan dan lain sebagainya. sebelum adanya aplikasi/ inovasi yang diterapkan oleh Desa Sugihwaras ini sistem informasi yang ada di kantor Pemerintahan Desa Sugihwaras masih menggunakan cara manual dimana masyarakat harus datang ke kantor Desa untuk bisa mendapat layanan informasi, hal ini terjadi karena belum adanya sistem informasi secara digital yang dapat diakses kapanpun oleh Masyarakat dalam aturan Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 tentang pelayanan informasi publik pada pasal 20 dijelaskan bahwa media teknologi yang harus dimiliki sekurang-kurangnya oleh pemerintah Desa Sugihwaras ialah *Website*, *blog*, Nomor Telpon atau layanan sms, grup *WhatsApp* dan *Facebook*. Media teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sugihwaras bertujuan untuk menjadi alat interaksi dan komunikasi digital antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat yang bisa berupa saran, kritik, informasi dan aduan pelayanan. Pemerintah Desa Sugihwaras menimbang bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Dan dengan adanya keterbukaan informasi publik dilingkup Pemerintahan Desa Sugihwaras merupakan sebuah sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa Sugihwaras (Nalayani & Ayu, 2016).

Gambaran program dan inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Sugihwaras, pada observasi yang dilakukan oleh peneliti mendapati bahwa kurangnya peranan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dan dinamisator yaitu memberikan sosialisasi kepada Masyarakat Desa terkait dengan adanya program-program dari Pemerintah Desa Sugihwaras belum berjalan secara maksimal hal ini ditambah dengan minimnya pengetahuan warga terkait dengan program-program tersebut, hal ini didukung oleh kajian dari penelitian Y.Afandi (2022) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui E-Bes masih belum dilaksanakan secara menyeluruh. Dan faktor penghambat lainnya adalah kurangnya peran pemerintah Desa dalam menjadi motivator dalam meningkatkan kualitas sumber daya pada Aparatur Desa sehingga banyak dari Aparatur Desa di Pemerintahan Desa sugihwaras yang belum memiliki kompetensi dalam menjalankan sistem teknologi informasi. Hal ini juga didukung dengan kajian-kajian yang ditulis oleh peneliti terdahulu diantaranya oleh M. Puspitasari (2023) dalam penelitian "*Innovation in Sugihwaras village, Sidoarjo district as A smart village Based on Government Policy*" dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada indikator smart government, smart people, smart environment, dan smart living berjalan baik ditunjukkan dengan inovasi berupa aplikasi sistem pelayanan berbasis elektronik, tetapi dalam implementasinya masih ada aplikasi yang belum berjalan sesuai dengan baik seperti Aplikasi E-Bes. Selanjutnya penelitian yang dilakukan D.Iswanto (2019) pada penelitian "Peran Pemerintahan Daerah dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintahan Desa dalam membangun *Smart village governance*". Dalam penelitian terdahulu peneliti berfokus pada peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan peran pendidikan dengan hasil penelitian bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendidik dapat berjalan tetapi masih tidak dibarengi dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya . Dan Penelitian yang ditulis oleh H. Nuraini (2021) dalam penelitian "Pengembangan *smart village* sebagai upaya menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BumDes pada masa pandemi Covid-19) studi kasus Bumdes Tirta Mandiri Ponggok, Kecamatan poloharjo. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa smart government, smart community, smart economy merupakan unsur penting dalam mewujudkan *smart village* [9]. Dalam kesemua penelitian terdahulu tersebut sama membahas secara empirik mengenai penerapan Desa pintar/*smart village* dapat dilihat dari prespektif masalah masing-masing, tetapi dalam penelitian terdahulu permasalahan utama yang dihadapi dilapangan yaitu masih kurangnya Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Desa dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan *smart village* (Gautama et al., 2020).

Metode Penelitian

Dalam penelitian terkait dengan "Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Smart Village*" Penelitian studikases ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian deskriptif peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjabarkann secara rinci serta mendalam mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Smart Village*. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan

informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling menurut (Sugiono, 2015) dijelaskan bahwa purposive sampling ini menentukan sampel dari informasi dan tentunya melalui pertimbangan. Informan pada penelitian ini diantaranya Kepala Desa dan Sekertaris Desa Sugihwaras. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini dengan memilih informan dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator dalam mewujudkan *smart village* dengan menggunakan tiga indikator menurut (Herdianan, 2019) [2] pertama, smart government, kedua smart community, ketiga smart environment. Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman: pertama pengumpulan data, pengumpulan data adalah teknik pengumpulan bahan data seperti observasi dan wawancara. Kedua reduksi data, reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan abstraksi serta transformasi data mentah pada penelitian sehingga mendapatkan ringkasan data penting. Ketiga penyajian data, yaitu pemaparan informasi yang didapat dilapangan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan semua data yang diperoleh peneliti dilapangan.

Hasil dan Pembahasan

Desa Sugihwaras merupakan Desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 107.168 hektar. Desa Sugihwaras adalah salah satu desa yang mempunyai penghargaan sebagai penyelenggara inovasi pelayanan terbaik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pengembangan sebuah inovasi dalam strategi komunikasi yang bermanfaat dalam menunjang peran pemerintah (*e-government*) (Gai et al., 2020).

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator sangatlah penting dalam mewujudkan *smart village* di Desa Sugihwaras. Dengan melibatkan beberapa aparatur desa, Pemerintah desa memfasilitasi guna mewujudkan pembangunan *smart village*. Fasilitator memiliki peranan sebagai penyedia sarana yang menunjang semua rencana dalam mewujudkan *smart village*. Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan *smart village* agar dapat menunjang kepentingan masyarakat dan aparatur desa dalam mewujudkan desa pintar. Demi menunjang keberhasilan penerapan konsep *smart village* di desa Sugihwaras, terdapat tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah desa Sugihwaras.

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator sangatlah penting dalam mewujudkan *smart village* di Desa Sugihwaras. Dengan melibatkan beberapa aparatur desa, Pemerintah desa memfasilitasi guna mewujudkan pembangunan *smart village*. Fasilitator memiliki peranan sebagai penyedia sarana yang menunjang semua rencana dalam mewujudkan *smart village*. Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan *smart village* agar dapat menunjang kepentingan masyarakat dan aparatur desa dalam mewujudkan desa pintar. Demi menunjang keberhasilan penerapan konsep *smart village* di desa Sugihwaras, terdapat tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah desa Sugihwaras (Istiyanti, 2020).

Pertama pemberian fasilitas berupa laptop kepada seluruh aparatur desa guna menunjang kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan *smart government*, Penyelenggaraan fungsi pemerintah desa sebagai struktur organisasi adalah bentuk dari penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan organisasi didalam struktur pemerintahannya terendah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dalam konsep *smart village* desa pemerintah desa memiliki peranan dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan pelayanan dan kinerja produktivitas pemerintah desa. Fasilitas berupa laptop merupakan satu sarana yang penting dalam menjalankan sistem *e-government* dimana semua kegiatan pemerintah beralih dari manual menjadi digital. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah desa Sugihwaras yang sejak tahun 2021 dinobatkan sebagai desa penyelenggara inovasi pelayanan terbaik di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Syaiful selaku kepala desa Sugihwaras:

“untuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa salah satunya adalah laptop untuk para pegawai pemerintah desa, yang kedua kita mempunyai aplikasi simahir (sistem data kematian dan kelahiran), jadi masyarakat desa selama ini masih ada yang bingung atau lupa dengan tanggal kematian keluarga atau saudaranya dengan aplikasi ini masyarakat desa sudah tau tanggal kematian tanpa harus ke makam” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Fasilitas yang kedua ialah aplikasi/ website smart RTku dan layanan jaringan wifi untuk masyarakat desa Sugihwaras. Pemerintah desa Sugihwaras saat ini bekerja sama dengan perusahaan Myrepublik untuk membangun jaringan di wilayah desa Sugihwaras dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan jaringan internet untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama yang berdampak pada kegiatan-kegiatan yang positif. Sedangkan pada website SmartRTku merupakan website yang dibuat untuk menjadi pos pengaduan dan pelaporan apabila ada terjadi masalah di lingkungan masyarakat desa. Berikut hasil wawancara bersama bapak Amiril selaku sekretaris desa Sugihwaras:

“ada smart RT ku, kita mencoba untuk mencerdaskan wilayah. Jadi masyarakat dan Pak Rt mempunyai akses untuk melaporkan setiap ada kegiatan, laporan/ pengaduan, smart rt ku itu juga bisa mengirimkan foto juga jadi kalau ada kejadian di wilayahnya pak Rt bisa melaporkan lewat website itu.

untuk fasilitas pemerintah desa juga bekerja sama dengan myrepublik untuk membangun jaringan internet wifi, jadi perhari ini Masyarakat Desa Sugihwaras ini sudah ada wifinya semua.” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Fasilitas selanjutnya yang diberikan oleh pemerintah desa sugihwaras ialah aplikasi E-Bes (elektronik badan usaha milik desa sugihwaras) yang bertujuan untuk memberikan wadah para pelaku Umkm untuk bisa tetap eksis dimasa pandemic covid 2019. Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Amiril selaku Sekertaris Desa Sugihwaras:

“kita ada aplikasi yang namanya E-Bes (elektronik bumdes sugihwaras) itu berjalan 2019 aplikasi ini untuk menjawab persoalan covid karena pada saat ini pelaku umkm tidak berdaya karena pembatasan psbb dan ppkm. Jadi inovasi ini lahir karena kebutuhan masyarakat jadi kita munculkann aplikas bernama E-Bes dan kebetulan saya yang membuatnya karena saya sendiri basicnya orang TI, jadi aplikasi ini pernah menjadi perbincangan di Indonesia bahkan perwakilan word bank Indonesia ini mewawancarai kita disini termasuk BRIN. E-Bes itu menjadi tonggak peningkatan perekonomian di Desa sugihwaras meskipun di massa covid” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa aplikasi E-Bes dimulai pada tahun 2019 dimana aplikasi ini dipergunakan atau difungsikan untuk membantu UMKM yang terbatas dalam penjualan secara offline dikarenakan kebijakan PSBB dan PPKM pada saat pandemic Covid-19. E-Bes menjadi aplikasi yang cukup familiar ketika pandemic Covid-19 yang berlangsung di tahun 2020 hingga 2021. Aplikasi ini pernah menjadi perbincangan di tingkat nasional hingga mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan World Bank di Indonesia, dan BRIN. Sehingga sampai saat ini Desa Sugihwaras menjadi desa percontohan dalam inovasi digital. Dalam pemberian fasilitas teknologi informasi juga diimbangi dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana salah satunya yaitu berupa bangunan yang dipergunakan untuk menunjang berjalannya BUMDes Desa Sugihwaras. berikut merupakan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagai fasilitas sebagai berikut:



Gambar 1. Lokasi BUMDes Desa Sugihwaras

Dalam mewujudkan *smart village* pemerintah desa memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan program desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dalam pemberian sarana prasarana, dan pendampingan. Peranan pemerintah desa dalam menjadi fasilitator sangatlah penting dalam menunjang pembangunan sebuah desa, fasilitas yang diberikan bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus berfokus pada prasarana yang ada. Aplikasi E-Bes merupakan aplikasi yang dibuat untuk penguatan ekonomi masyarakat desa. sebelum adanya aplikasi ini masyarakat menjalankan dagangannya dengan cara mempromosikan secara offline, dan setelah adanya aplikasi E-Bes promosi dilakukan secara digital dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Pemerintah Desa dengan perannya sebagai motivator sangat dibutuhkan supaya geliat usaha dalam mewujudkan *Smart Village* terus berkelanjutan. Pemerintah desa Sugihwaras dalam perannya sebagai motivator bertindak sebagai pendamping dalam memberikan motivasi kepada aparatur desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan *smart village* Pemerintah Desa dalam membangun desa cerdas dapat diawali dengan memotivasi dan menggerakkan seluruh elemen yang berkepentingan guna memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam melaksanakan kegiatan administrasidesa dengan menggunakan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun peran yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai motivator yaitu selalu mendukung dan mendorong para perangkat desa untuk ikut andil dalam setiap pembinaan dan perlombaan inovasi digital ditingkat kabupaten maupun provinsi berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Amiril selaku sekretaris desa Sugihwaras:

“Ada Inotek atau inovasi teknologi, jadi inovasi teknologi ini inovasi ditingkat desa untuk diadu di tingkat provinsi, jadi kemarin desa Sugihwaras sampai masuk 15 besar untuk lomba PPID”
(Wawancara, 04 Januari 2024)

Pelaksanaan jalannya pemerintahan yang baik harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapih dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan berguna bagi penyusunan program. Oleh karena itu perlunya pendampingan dan pelatihan kepada para aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah desa sugihwaras selalu mendorong para aparatur dan elemen masyarakat lainnya untuk selalu mengikuti pelatihan guna meningkatkan skill dalam menjalankan teknologi. Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Amiril selaku sekretaris Desa Sugihwaras (Attar et al., 2013):

“Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga ada pembinaan dalam menjalankann aplikasi/ website desa. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika juga ada kemarin ada pembinaan mengenai PPID di BKD, jadi kita sebagai pemerintah desa mensupport kaur masing-masing untuk bisa mewujudkan desa pintar” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Selanjutnya ialah pemberian pendidikan teknologi informasi melalui program griya sinau digital. Griya sinau digital merupakan program yang dimulai pada tahun 2019 dengan tujuan

untuk membangun generasi digital sejak dini. program ini menyasar anak-anak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pelatihan yang dibeikan pada program ini ialah pelatihan desain grafis, Microsoft office, video editing daln lain sebagainya. berikut adalah hasil wawancara dengan bapak syaiful selaku kepala desa dan bapak amiril selaku sekretaris desa sugihwaras:

“kita tiap minggu ada kegiatan griya sinau digital. Griya sinau digital ini untuk anak yang kurang mampu agar supaya bisa paham digitalisasi. Program ini dari 2019 sampai hari ini kita sudah punya delapan puluh anak didik yang mana kegiatan itu dilakukan setiap minggu pagi dibagi beberapa gelombang tanpa biaya apapun, untuk outputnya anak anak sd disana setelah ikut program ini bisa mahir desain. Pemerintah Desa Sugihwaras ini pingin desanya menjadi maju, untuk itu pemanfaatan teknologi menjadi menjadi prioritas dalam pelayanan, baik dari segi administrasi/pembayaran jasa melalui Bumdes” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Pentingnya peranan motivator dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai motivator harus mampu memberikan motivasi kepada warga agar ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan mudah. Pemerintah daerah dan desa dalam mensukseskan *e-government* terusmemberi pendampingan baik aparatur di tingkat desa maupun daerah. Berikut merupakan penjelasan beserta tujuan dari program-program yang ada di Desa Sugihwaras sebagai berikut :

Tabel 3. Inovasi Desa Sugihwaras

Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sugihwaras (2023)

NO	INOVASI/ PROGRAM	TUJUAN
1	Griya Sinau Digital	memberikan pemerataan fasilitas kepada anak-anakyang kurang mampu untuk belajar mengenai dunia digital
2	Pembinaan UMKM	Memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKMdi Desa Sugihwaras dalam menjalankan marketplace
3	Aplikasi E-Bes (elektronik BUMDes Sugihwaras)	Inovasi Dari Pemerintah Desa guna membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat di era pandemi
4	Aplikasi Simahir (Sistem data Kematian dankelahiran)	Untuk mempermudah masyarakat dalam mencari data kematian dan kelahiran seseorang
5	Website SmartRTku	Pos pengaduan online yang mempermudah Masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada Pemerintah Desa Sugihwaras

Pada tabel3 dapat diketahui bahwa ada lima aplikasi berbasis *e-government*, dimana aplikasi atau web tersebut memiliki berbagai macam kegunaan salah satunya yaitu untuk membantu

mengembangkan UMKM yang ada di Desa Sugihwaras, aplikasi E-Bes yang digunakan untuk BUMDes Desa Sugihwaras. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi peluang masyarakat dalam mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa. teknologi informasi dihadirkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat guna ikut berkontribusi dalam pengembangan desa. Pemerintah desa sebagai motivator harus mampu memotivasi kepada aparatur desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan guna menciptakan kondisi yang diinginkan. Untuk menjadikan desa Sugihwaras menjadi desa yang maju, Pemerintah desa yaitu kepala desa selalu mendorong para aparatur desa dan juga masyarakat untuk turut serta dalam mengikuti pelatihan dan perlombaan dibidang teknologi informasi desa, adapun tujuan yang diharapkan adalah aparatur desa mampu melihat dan belajar lebih dalam lagi terkait inovasi teknologi di era saat ini.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah adalah membawa perubahan dalam kebaikan bersama dalam keutuhan bangsa dan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah desa sugihwaras memiliki komitmen untuk selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan mewujudkan desa digital yang meraih penghargaan inovasi pelayanan terbaik 2021 se-kabupatensidoarjo. Dalam mewujudkan *smart village* pemerintah desa sugihwaras berperan dalam pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada Masyarakat. dalam perannya sebagai dinamisator ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah desa Sugihwaras diantaranya dalam menampung aspirasi masyarakat desa, Desa Sugihwaras memiliki aplikasi/website Smart Rtku yang berfungsi sebagai pos pengaduan masyarakat kepada pemerintah desa apabila ada permasalahan yang menyangkut tentang ketertiban dan keamanan desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa Sugihwaras:

“Desa Sugihwaras mencoba untuk mengimbangi smart city nya sidoarjo,akhirnya desa sugihwaras membuat desa digital. Yang mana seluruh pelayanan ke masyarakat itu menggunakan aplikasi untuk menjawab tantangan digital juga” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Desa digital merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah demi memberikan layanan informasi di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan teknologi. Pembuatan platform pada desa digital berfokus pada keterbukaan informasi pelayanan dan perekonomian. Dalam penerapannya di desa Sugihwaras konsep desa digital sudah mulai dijalankan, hal ini ditandai dengan adanya sistem layanan informasi dan juga aplikasi layanan yang menjawab kebutuhan masyarakat desa. dalam mendorong keberhasilan program desa digital perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras yaitu memberikan arahan

kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan program ini. Hal ini disampaikan oleh bapak amiril selaku sekertaris desa Sugihwaras:

“yang pertama kita sosialisasi dan berkomunikasi dengan warga bahwa ada program dari desa agar warga ikut andil dalam program atau melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa dan kegiatan kelompok kemasyarakatan lainnya. kalau yang dilakukan pemerintah desa dalam desa cerdas kita sudah berusaha, jadi pendataan-pendataan kita sudah digitalisasi, seperti pendataan kelahiran, kematian, dan desa membuat aplikasi untuk menunjang agar para stekholder seperti Pak Rt/Rw, kader Pkk, dll ini bisa melaporkan lewat aplikasi. Jadi datanya nanti bisa dipakai untuk pertimbangan kepala desa” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Musyawarah adalah kegiatan penting dalam melaksanakan pembangunan desa. Desa Sugihwaras dalam mewujudkan desa cerdas atau *smart village* turut serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan program-program desa hal ini berujuan untuk menemukan kebaikan bersama demi menciptakan kondisi desa yang diinginkan. Saat ini pemerintah desa sugihwaras selalu memberikan kemudahan akses dalam pelaporan dan pengaduan terkait dengan persoalan yang ada ditengah masyarakat desa Sugihwaras, Peranan dinamisator atau penggerak dari pemerintah desa juga diwujudkan dalam keputusan kepala desa Sugihwaras Nomor 36 Tahun 2019 bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan. Dengan pembentukan Pejabat pengelola informasi dan komunikasi ini menjadi satu landasan hukum untuk para aparatur desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dokumen keputusan kepala desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tataran sosial dapat digunakan untuk pengembangan dan penguatan nilai adat, budaya, dan struktur sosial. Tumbuhnya teknologi dalam informasi yang tepat dalam tatanan sosial akan menciptakan kelestarian struktur sosial.

Simpulan

Berdasarkan peranan pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dengan menggunakan tiga indikator *smart government*, *smart community* dan *smart environment* dalam mewujudkan smart village di desa sugihwaras; Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator telah dijalankan dengan baik hal ini dilihat dengan beberapa inovasi yang dibuat oleh pemerintah desa sugihwaras khususnya inovasi melalui aplikasi/website yang memberikan dampak kemudahan masyarakat desa dalam melakukan pelayanan dan mempermudah dalam mendapatkan informasi desa, hal ini sejalan dengan indikator *smart government* dimana pemerintah desa berperan dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan pelayanan dan kinerja produktivitas pemerintah desa.

Peran pemerintah desa sebagai motivator ditunjukkan dengan adanya dorongan dari kepala desa untuk seluruh elemen dari pegawai aparatur desa dengan pendampingan dan pendidikan sehingga masyarakat untuk turut serta dalam mensukseskan konsep smart village bersama-sama. Dalam

mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi pemerintah desa telah membuat aplikasi dan website yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Diantaranya ialah website smart rtku yang dibuat dengan tujuan sebagai pos pengaduan masyarakat apabila terjadi masalah di lingkungan desa, selanjutnya ada aplikasi E-Bes yang dibentuk untuk menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi desa sugihwaras, hal ini sejalan dengan indikator *smart community*. Dalam konsep *smart village* indikator *smart community* ditujukan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi peluang bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa. teknologi informasi dihadirkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat guna ikut berkontribusi dalam pengembangan desa.

Peranan pemerintah sebagai dinamisator juga berjalan dengan baik, hal ini ditujukan dengan adanya gerakan untuk mengubah dari desa yang pelayanan publiknya dilakukan secara manual menjadi pelayanan yang berbasis digital (*e-government*). Sedangkan dalam indikator *smart environment* dimana identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan dalam hasil wawancara dan observasi belum menunjukkan keberhasilan secara nyata.

Daftar Pustaka

- Afandi, Y., & Prathama, A. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Aplikasi Elektronik Bumdesa Sugihwaras (e-BES) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2),
- Agung Saputra, M., & Rahman Isnain, A. (2021). PENERAPAN SMART VILLAGE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN METODE WEB ENGINEERING (Studi Kasus: Desa Sukanegeri Jaya). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 2(3), 49–55. Retrieved from <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTISI>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., & ... (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). ... *Ekonomi Dan Bisnis*. <http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>
- Attar, M., Hakim, L., & Yanuwidi, B. (2013). Analisis potensi dan arahan strategi kebijakan pengembangan desa ekowisata di Kecamatan Bumiaji–Kota Batu. *Journal of Indonesian Tourism*

<https://search.proquest.com/openview/0da50aebf19399ee04827d42405477be/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2047999>

- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmonisasi Inovasi Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 291–303. <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p291-303>
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa. *core.ac.uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/347189938.pdf>
- Gautama, B. P., Yuliatwati, A. K., & ... (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal ...* <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/414>
- Giffinger, R. (2007). Smart cities Ranking of European medium-sized cities. *Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies*, 16(October), 1–24.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *Jurnal IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Hidayana, B., Kutanegara, P. M., & ... (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti ...* <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1290842&val=11670&title=Participatory%20Rural%20Appraisal%20PRA%20untuk%20Pengembangan%20Desa%20Wisata%20di%20Pedukuhan%20Pucung%20Desa%20Wukirsari%20Bantul>
- IDM. (2023). Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*. <https://jurnalpenyuluhan.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/29563>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpp/article/view/2340>
- Lembaran, T., Republik, N., & Nomor, I. (2018). Bupati sidenreng rappang provinsi sulawesi selatan (No. 6, pp. 1–10).

- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/2806>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11, 101–112. Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/8243>
- Mulyan, A., & Isnaini, L. M. Y. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaliang Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Mandala* <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/3708>
- Murdiyanto, E. (2011). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Karanggeneng, purwobinangun, pakem, Sleman. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan* <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/48893>
- Nalayani, N., & Ayu, N. N. (2016). Evaluasi dan strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/download/18354/11882>
- Nuraini Syafitri, N. S., & Sadad, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9301](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9301)
- Nuraini, H., Larasati, E., Suwitri, S., & Nugraha, H. S. (2021). Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(4), 862. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i4.777>
- PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENUJU SMART CITY DI KABUPATEN SIDOARJO, 1–26.
- Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Informasi Publik. (n.d.). Retrieved from <https://ppid.sugihwaras.desa.id/wp-content/uploads/2023/09/Perdes-PPID.pdf>
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/591>

-
- Raldianingrat, W., & Fitria, F. (2021). Kajian Model Desa Cerdas (Smart Village) berbasis Satu Desa Satu Greenhouse pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Desa di Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), 278. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v11i2.224>
- Saepudin, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata. Dharmakarya: *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gampong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan* <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4527>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2016). 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Utomo, S. J., & Satriawan, B. (2017). Strategi Pengembangan desa wisata di kecamatan karangploso kabupaten Malang. *Jurnal Neo-Bis*. <https://www.academia.edu/download/81494816/pdf2.pdf>
- Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686265&val=18337&title=Strategi%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Dalam%20Pengembangan%20Desa%20Wisata%20Nglanggeran>